



**REPRESENTASI GENDER DALAM RETORIKA POLITIK ISLAM MASA
KEMERDEKAAN**

Retno Endah Kusuma Wardani
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
retnoendah08@gmail.com

Adzrah Dwi Sunarty Abas
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
adzrahdwi@gmail.com

Sidqi Ali
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
ali.sidqi29@gmail.com

Miftahul Huda
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dr.miftahulhuda@pba.uin-malang.ac.id

Abstract:

This study examines gender representation in Islamic political rhetoric during Indonesia's independence period, focusing on how women were portrayed in Islamic and nationalist discourses. The study aims to analyze the construction of women's roles in Islamic political rhetoric during the 1940s and early 1950s, a period marked by the formation of Indonesia's national identity and political system. This research employs a qualitative approach using library research. Data were collected from secondary sources, including scholarly journal articles, books, previous studies, and other academic publications related to Islamic politics, gender, and socio-political dynamics during the independence era. The data were analyzed through content analysis involving data reduction, thematic categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that women were represented in three dominant forms: as moral symbols of society, supporters of the national struggle, and guardians of the domestic sphere. These representations acknowledged women's contributions to society and nation-building while simultaneously positioning them within family-oriented and moral responsibilities. The study concludes that Islamic political rhetoric during the independence period played an important role in shaping gender norms and public perceptions of women's roles, while also reinforcing limitations on women's participation in formal political spaces.

Keywords: *gender representation, Islamic political rhetoric, independence era, women, discourse.*



Abstrak:

Penelitian ini mengkaji representasi gender dalam retorika politik Islam pada masa kemerdekaan Indonesia dengan fokus pada bagaimana perempuan direpresentasikan dalam wacana keislaman dan kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi peran perempuan dalam retorika politik Islam pada periode 1940-an hingga awal 1950-an, yaitu masa pembentukan identitas nasional dan sistem politik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik lain yang berkaitan dengan politik Islam, gender, serta dinamika sosial-politik pada masa kemerdekaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan dalam tiga bentuk utama, yaitu sebagai simbol moral masyarakat, pendukung perjuangan nasional, dan penjaga ranah domestik. Representasi tersebut mengakui kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa, tetapi pada saat yang sama tetap menempatkan mereka dalam tanggung jawab yang berorientasi pada keluarga dan moralitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa retorika politik Islam pada masa kemerdekaan berperan penting dalam membentuk norma gender dan persepsi masyarakat mengenai peran perempuan, sekaligus memperkuat batasan terhadap partisipasi perempuan dalam ruang politik formal.

Kata kunci: representasi gender, retorika politik Islam, masa kemerdekaan, perempuan, wacana.

PENDAHULUAN

Masa kemerdekaan Indonesia merupakan periode penting bagi pembentukan identitas politik, sosial, dan keagamaan bangsa. Pada era ini, sejumlah tokoh Islam seperti Mohammad Natsir, Wahid Hasyim, dan para pemimpin Masyumi berperan dalam membangun fondasi negara melalui gagasan, pidato, serta wacana politik yang disebarluaskan melalui berbagai media dan organisasi Islam. Selain itu, media perempuan Islam seperti *Suara Aisyiyah* dan organisasi perempuan Islam turut berkontribusi dalam membentuk diskursus mengenai posisi dan peran perempuan dalam masyarakat. Namun, perhatian terhadap bagaimana perempuan direpresentasikan dalam retorika politik Islam pada masa tersebut masih relatif terbatas. Padahal, representasi gender dalam wacana politik memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial, membangun legitimasi kekuasaan, serta menentukan ruang gerak perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kajian mengenai konstruksi perempuan dalam retorika politik Islam pada periode awal

kemerdekaan menjadi penting untuk memahami bagaimana agama, politik, dan relasi kekuasaan berinteraksi dalam membentuk pemahaman tentang gender di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas hubungan antara Islam dan politik pada masa kemerdekaan, seperti kajian tentang peran partai-partai Islam, dinamika perumusan dasar negara, serta kontribusi tokoh Islam dalam proses institusionalisasi nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Beberapa studi juga menyoroti peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan secara umum, terutama dalam konteks gerakan nasionalisme dan organisasi perempuan pada masa kolonial. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji representasi perempuan dalam retorika politik tokoh Islam masih jarang dilakukan.

Penelitian bahasa politik Islam umumnya berfokus pada ideologi, konsep negara Islam, atau hubungan antara agama dan demokrasi, sehingga aspek gender belum menjadi perhatian utama. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait bagaimana konstruksi perempuan dibangun melalui wacana politik Islam pada periode yang sangat menentukan bagi arah perkembangan bangsa.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah berupa analisis mendalam mengenai representasi perempuan dalam bahasa politik Islam pada masa kemerdekaan Indonesia dimana suatu tema yang belum banyak disentuh dalam penelitian terdahulu, terutama dari perspektif analisis wacana historis. Kebaruan tersebut terletak pada upaya menghubungkan dinamika politik Islam dengan konstruksi gender melalui penelaahan pidato, tulisan, dan pernyataan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh pada masa itu. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memperluas pemahaman mengenai bagaimana gender dinegosiasikan dalam wacana politik Islam pada era pembentukan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut: bagaimana representasi perempuan dibangun dalam retorika politik Islam pada masa kemerdekaan Indonesia, dan sejauh mana konstruksi tersebut mempengaruhi batasan serta peluang peran perempuan dalam ruang politik? Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis wacana terhadap dokumen-dokumen historis yang relevan, sehingga dapat

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara wacana politik Islam, konstruksi gender, dan proses pembentukan bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi perempuan dalam retorika politik Islam pada masa kemerdekaan melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis untuk memahami konteks sosial-politik pada masa kemerdekaan serta pendekatan gender untuk menganalisis konstruksi representasi perempuan yang muncul dalam berbagai wacana keislaman dan kebangsaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk representasi perempuan, tetapi juga menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya.

Sumber data penelitian berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, prosiding, dan dokumen akademik lain yang membahas perempuan, politik Islam, dan dinamika sosial pada masa kemerdekaan Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan representasi perempuan dalam retorika politik Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola representasi perempuan yang muncul dalam berbagai literatur, kemudian menafsirkan makna representasi tersebut dalam konteks sosial-politik masa kemerdekaan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari penulis dan perspektif yang berbeda. Melalui proses tersebut, diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif



mengenai bentuk-bentuk representasi perempuan dalam retorika politik Islam pada masa kemerdekaan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Retorika Politik Islam Masa Kemerdekaan Tahun 1940–1950: Situasi Politik, Peran Tokoh Islam, serta Posisi Sosial Perempuan

Pada periode transisi menuju dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bahasa politik yang digunakan oleh tokoh-tokoh Islam dibentuk oleh kebutuhan untuk mengukuhkan Islam sebagai sumber legitimasi moral bagi negara yang baru berdiri. Dalam situasi politik yang belum stabil, ketika perdebatan mengenai dasar negara, bentuk pemerintahan, dan arah pembangunan nasional masih berlangsung, retorika keagamaan digunakan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi kelompok Islam dalam arena politik nasional¹. Wacana tersebut disebarluaskan melalui pidato, surat kabar, majalah, dan forum organisasi Islam yang berkembang pada masa itu.

Salah satu contoh dapat ditemukan dalam pidato dan tulisan politik Mohammad Natsir yang menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pidatonya pada Konstituante tahun 1957, Natsir menyatakan bahwa “Islam adalah suatu ideologi yang lengkap, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.”² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam diposisikan bukan sekadar agama dalam pengertian ritual, melainkan sebagai sumber nilai yang mampu menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Pilihan diksi seperti “ideologi yang lengkap” dan “seluruh aspek kehidupan manusia” memperlihatkan upaya membangun legitimasi bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi langsung terhadap urusan politik dan kenegaraan.

¹ Djilzaran Nurul Suhada et al., *Wacana dan Kuasa Retorika Linguistik-Politik Agama dalam Gerakan Sosial Indonesia*, 2024.

² Lukman et al., ‘Konsep Toleransi Dalam Dakwah M. Natsir Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 7, no. 2 (2024): 17–43, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i2.270>.

Retorika semacam ini kemudian menjadi sarana untuk menghubungkan identitas keislaman dengan semangat nasionalisme Indonesia³. Melalui penggunaan istilah-istilah seperti akhlak, tanggung jawab, kewajiban, dan kemaslahatan umat, para tokoh Islam berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan negara tidak hanya membutuhkan kekuatan politik, tetapi juga fondasi moral yang kuat. Dengan demikian, bahasa politik Islam pada masa awal kemerdekaan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi keyakinan keagamaan, melainkan juga sebagai instrumen komunikasi politik yang digunakan untuk membangun legitimasi, memobilisasi dukungan masyarakat, dan membentuk arah wacana kebangsaan Indonesia⁴.

Konteks sosial-kultural pada dekade 1940-1950an turut memengaruhi bagaimana perempuan direpresentasikan dalam retorika politik Islam. Meskipun perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan perjuangan kemerdekaan, mulai dari dukungan logistik, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas organisasi masyarakat, wacana politik yang berkembang pada masa itu masih cenderung menempatkan perempuan sebagai penjaga moral keluarga dan pendidik generasi bangsa⁵. Representasi tersebut tampak dalam berbagai pidato, artikel surat kabar, maupun publikasi organisasi Islam yang menggambarkan perempuan melalui istilah-istilah seperti “ibu”, “pendidik anak”, dan “penjaga akhlak keluarga”.

Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi pengakuan tersebut lebih banyak dikaitkan dengan fungsi domestik dan moral daripada kapasitas politik yang mandiri⁶. Diksi seperti “ibu” dan “pendidik” membangun citra perempuan sebagai penanggung jawab pembentukan karakter generasi bangsa, sementara peran-peran strategis dalam pengambilan keputusan politik lebih sering diasosiasikan dengan

³ Syahrul Adli, *Mosi Integral: Gagasan M. Natsir Dalam Mempersatukan Indonesia Tahun 1950*, 2023.

⁴ Zulfadli et al., ‘From Islamic Modernism to Islamic Conservatism: The Case of West Sumatra Provinces, Indonesia’, *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2406297, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2406297>.

⁵ Rania Dhiyaulhaq Aisyah, *Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965*, 8, no. 2 (2025).

⁶ Hanina Najma Adzkie and Farhan Fahreza, *Pemikiran Pendidikan Rahmah El Yunusiyah: Nilai Keislaman Dan Emansipasi Perempuan Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Kontemporer*, 2025.

laki-laki⁷. Pola representasi ini tidak terlepas dari kuatnya norma patriarki dan struktur sosial yang berkembang pada masa awal kemerdekaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa retorika politik Islam pada periode tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mempertahankan konstruksi sosial mengenai peran perempuan dalam masyarakat.

Retorika Islam pada masa itu tidak monolitik terdapat variasi pandangan antara kalangan yang lebih konservatif, yang menekankan kodrat dan peran domestik perempuan, dan kelompok reformis yang mulai membuka ruang diskusi mengenai pendidikan dan partisipasi sosial perempuan. Meski demikian, garis besar narasi tetap cenderung menempatkan perempuan dalam ranah domestik sebagai strategi untuk merekatkan legitimasi moral gerakan politik Islam di hadapan publik. Sejumlah studi kontemporer yang merekonstruksi wacana tersebut menunjukkan bahwa representasi ini memiliki fungsi ganda: di satu sisi memberikan pengakuan simbolik terhadap kontribusi perempuan; di sisi lain mempertahankan struktur kepemimpinan yang berorientasi maskulin dengan menjaga otoritas politik tetap berada di tangan laki-laki⁸. Penelitian-penelitian mutakhir terhadap arsip organisasi perempuan Islam, seperti *Aisyiyah* atau *Muslimat NU*, serta publikasi aktivis perempuan periode awal republik menunjukkan bagaimana wacana semacam itu tidak hanya diproduksi, tetapi juga diwariskan dan kemudian dinegosiasikan oleh perempuan sendiri untuk memperjuangkan perluasan ruang gerak mereka. Transformasi wacana ini memperlihatkan dinamika bahwa perempuan bukan penerima pasif, tetapi juga aktor yang berupaya memodifikasi konstruksi sosial-politik yang ada⁹. Dengan demikian, retorika politik Islam yang dahulu bersifat membatasi kini justru menjadi medium negosiasi yang membuka jalan bagi reinterpretasi peran perempuan dalam masyarakat Muslim modern.

⁷ Ulyan Nasri and Nasirin Nasirin, *Tafsir Gender Dan Peran Pendidikan Islam Bagi Perempuan Di Zaman Kolonial*, 3, no. 2 (2025).

⁸ Mufti Wardani, 'Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, dan Sosio-Politik', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1286–97, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.644>.

⁹ Greg Barton et al., 'Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia', *Religions* 12, no. 8 (2021): 641, <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.

Bentuk-Bentuk Representasi Perempuan dalam Retorika Politik Islam

Berdasarkan analisis terhadap pidato tokoh-tokoh Islam, publikasi Masyumi, serta media perempuan Islam seperti Suara Aisyiyah pada periode 1945–1955, ditemukan tiga bentuk representasi perempuan yang dominan dalam retorika politik Islam, yaitu perempuan sebagai simbol moral masyarakat, pendukung perjuangan nasional, dan penjaga ranah domestik. Ketiga bentuk representasi tersebut dibangun melalui pilihan diksi dan konstruksi bahasa yang secara berulang muncul dalam berbagai wacana politik dan keagamaan pada masa kemerdekaan.

Representasi pertama menempatkan perempuan sebagai simbol moral masyarakat. Dalam berbagai wacana Islam, perempuan sering digambarkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, pembinaan keluarga, dan penjagaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk representasi tersebut tampak dalam ungkapan bahwa “ibu merupakan *madrasah ula* (sekolah pertama) bagi anak-anaknya yang menanamkan nilai iman, akhlak, dan adab sejak usia dini¹⁰” serta dipandang sebagai “lembaga pendidikan yang membentuk generasi unggul karena berperan langsung dalam pembentukan kepribadian dan moral anak-anak.¹¹”

Penggunaan istilah *madrasah ula*, lembaga pendidikan, dan pembentuk moral menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan sebagai fondasi moral masyarakat. Melalui diksi tersebut, perempuan tidak hanya dipahami sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pembentukan karakter generasi bangsa. Namun, representasi ini sekaligus menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perempuan lebih banyak diberikan melalui fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan moral dalam keluarga. Dengan demikian, perempuan memperoleh posisi yang penting secara simbolik dalam kehidupan sosial, tetapi peran tersebut tetap dilekatkan pada tanggung jawab domestik dan pembentukan moral masyarakat.

Representasi kedua menempatkan perempuan sebagai pendukung perjuangan nasional. Bentuk representasi ini banyak ditemukan dalam berbagai tulisan dan

¹⁰ Khoiril Anisa, *Peran Sosial Perempuan Pada Zaman Rasulullah Hingga Zaman Modern*, 5, no. 3 (2025).

¹¹ Anisa, *Peran Sosial Perempuan Pada Zaman Rasulullah Hingga Zaman Modern*.

publikasi yang membahas keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Salah satu gambaran yang muncul adalah bahwa perempuan dipandang sebagai kelompok yang berperan dalam mendukung perjuangan politik melalui organisasi-organisasi perempuan. Sebagaimana disebutkan bahwa “keterlibatan politik perempuan sangat diperlukan pasca kemerdekaan sebagai bentuk dukungan dan simpatisan dari partai politik¹²” serta diwujudkan melalui berbagai organisasi perempuan yang berkembang pada masa tersebut.

Representasi tersebut menunjukkan bahwa perempuan diakui sebagai bagian dari perjuangan bangsa, tetapi pengakuan itu lebih sering ditempatkan dalam posisi pendukung daripada pengambil keputusan. Hal ini tampak dari penggunaan istilah seperti dukungan, simpatisan, dan keterlibatan, yang menekankan kontribusi perempuan dalam memperkuat gerakan politik yang telah ada. Bahkan ketika perempuan terlibat aktif dalam organisasi dan kegiatan politik, peran mereka lebih banyak direpresentasikan sebagai pemberi dukungan terhadap perjuangan kolektif daripada sebagai pemegang otoritas politik¹³. Dengan demikian, retorika yang berkembang tidak sepenuhnya meniadakan kehadiran perempuan dalam perjuangan nasional, tetapi membingkainya sebagai kekuatan pendukung yang membantu keberlangsungan gerakan politik dan sosial pada masa kemerdekaan.

Representasi ketiga adalah perempuan sebagai penjaga ranah domestik. Representasi ini tampak dalam berbagai wacana yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sebagaimana digambarkan dalam berbagai kajian, perempuan, khususnya ibu atau istri, sering diposisikan sebagai pengelola utama rumah tangga yang bertugas mengatur anggaran, mengelola pengeluaran harian, serta menentukan prioritas kebutuhan keluarga¹⁴. Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa

¹² Hardiman Wirahman and Nur Alfiyani, ‘Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia’, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 114–31, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.463>.

¹³ Muslim Pohan, ‘Politik Seksual Terhadap Organisasi Perempuan Pasca Kemerdekaan Di Indonesia’, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 1 (2020): 22–30, <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1554>.

¹⁴ Wahyu Wibowo et al., ‘Perempuan dan Literasi Finansial dalam Rumah Tangga: Sintesis Literatur Gender dan Ekonomi’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2026).

perempuan dipandang sebagai aktor penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, tetapi peran tersebut tetap dilekatkan pada ruang domestik.

Penggunaan ungkapan seperti “pengelola rumah tangga”, “pengatur kebutuhan keluarga”, dan “penjaga stabilitas keluarga” memperlihatkan adanya pembingkaihan mengenai posisi ideal perempuan dalam masyarakat. Melalui konstruksi bahasa tersebut, rumah tangga ditempatkan sebagai ruang utama aktivitas perempuan, sedangkan peran-peran strategis di luar ranah domestik memperoleh perhatian yang lebih terbatas. Bahkan ketika perempuan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan keluarga, pengambilan keputusan yang bersifat strategis masih sering diasosiasikan dengan laki-laki¹⁵. Dengan demikian, representasi ini menunjukkan bagaimana perempuan memperoleh pengakuan melalui perannya dalam keluarga, sekaligus memperlihatkan adanya batasan-batasan sosial yang mengaitkan identitas perempuan dengan tanggung jawab domestik.

Ketiga bentuk representasi tersebut menunjukkan bahwa perempuan hadir dalam retorika politik Islam melalui peran-peran yang berkaitan dengan moralitas, perjuangan sosial, dan kehidupan keluarga. Meskipun masing-masing representasi memberikan pengakuan terhadap kontribusi perempuan, seluruhnya dibangun melalui konstruksi bahasa yang menempatkan perempuan pada fungsi-fungsi tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat dan bangsa. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam retorika politik Islam masa kemerdekaan dibentuk melalui pilihan bahasa yang tidak hanya menggambarkan perempuan, tetapi juga menentukan bagaimana posisi dan peran mereka dipahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ambivalensi Wacana Gender dalam Bahasa Politik Islam

Wacana gender dalam bahasa politik Islam pada masa kemerdekaan Indonesia beroperasi dalam konteks yang sangat ambivalen. Di satu sisi, tokoh-tokoh Islam memobilisasi citra perempuan sebagian integral dari proyek nasional sampai ke ibu bangsa, pendidik generasi, penjaga akhlak sampai untuk mendukung klaim moral

¹⁵ Shopiyyah Nazwa and Nuriza Dora, *Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan*, 9 (2024).

atas kemerdekaan dan legitimasi politik islam. Di sisi lain, cara perempuan direpresentasikan justru meneguhkan batas-batas peran gender yang secara halus, tetapi tegas, mengembalikan perempuan pada ranah domestik dan subordinasi terhadap laki-laki. Ambivalensi ini dapat dibaca sebagai ketegangan antara kebutuhan politik untuk mengakui kontribusi perempuan dalam perjuangan dan upaya mempertahankan struktur sosial keagamaan yang patriarkal.

Jika ditarik kebelakang, pengalaman organisasi perempuan Islam seperti 'Aisyiyah dan Muslimat atau Fatayat NU menunjukkan bahwa sejak sebelum hingga sesudah kemerdekaan, wacana keagamaan dan politik yang mereka produksi selalu bernegosiasi dengan norma patriarki yang kuat. Penelitian tentang sejarah gerakan perempuan NU misalnya menunjukkan bagaimana perempuan NU mulai diakui sebagai bagian dari struktur organisasi, tetapi pada awalnya hanya sebagai "pengikut dan pendengar", bukan pengambil keputusan. Ambivalensi ini tercermin dalam retorika tokoh-tokoh laki-laki: perempuan diakui penting sebagai "pendukung dakwah" dan "pendamping ulama", namun jarang ditempatkan sebagai subjek politik yang otonom.

Dalam bahasa politik islam masa kemerdekaan, perempuan sering ditampilkan sebagai simbol moralitas kolektif. Narasi tentang kesucian perempuan, kehormatan keluarga, dan tugas sebagai ibu rumah tangga berfungsi sebagai perangkat retorik untuk mengikat umat kepada agenda politik tertentu, misalnya pembelaan islam sebagai dasar moral bangsa, atau dukungan terhadap partai atau organisasi islam tertentu. Pola ini sejalan dengan temuan kajian-kajian mutakhir tentang bagaimana media dan organisasi islam menggunakan representasi perempuan sebagai penjaga moral public sembari tetap menempatkan mereka dalam konstruksi domestik dan relasional (istri atau ibu dari tokoh laki-laki).¹⁶

Ambivalensi juga tampak pada cara kontribusi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dibingkai. Di dalam ingatan kolektif dan pidato-pidato tokoh islam, perempuan kerap disebut sebagai pendukung perjuangan melalui aktivitas logistik,

¹⁶ Hamidah Hamidah, 'Indonesian Islamic Movement of Women: A Study of Fatayat Muslimat Nu (1938-2013)', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 162-74, <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.260>.

pengobatan, dapur umum, atau doa dan pengorbanan dibelakang garis depan. Namun, formula bahasa yang digunakan jarang mengakui mereka sebagai aktor politik yang mengambil posisi dan keputusan strategis, mereka lebih sering diceritakan sebagai pihak yang memungkinkan perjuangan laki-laki. Dalam perspektif studi gender, ini adalah bentuk inklusi simbolik tetapi eksklusi substantif¹⁷. Yaitu perempuan hadir dalam narasi, tetapi tidak hadir sebagai subjek yang memiliki suara dan agensi setara.

Ditingkat ideologis, wacana gender dalam bahasa politik Islam masa itu juga dipengaruhi cara islam ditarik masuk ke dalam diplomasi dan nasionalisme. Kajian tentang islam dalam politik luar negeri Indonesia 1945-1949 menunjukkan bagaimana solidaritas ukhuwah islamiyyah digunakan sebagai modal diplomatik, sementara di dalam negeri, bahasa islam dipakai untuk menegaskan citra Indonesia sebagai bangsa bermoral dan religius. Dalam kerangka ini, perempuan sering dibingkai sebagai bukti keberhasilan islam dalam melindungi keluarga dan masyarakat sampai hal yang memberi legitimasi moral pada tuntutan kemerdekaan namun sekaligus membatasi ruang mereka pada fungsi-fungsi perlindungan domestik dan reproduksi sosial, bukan partisipasi politik langsung¹⁸.

Ambivalensi semakin jelas jika dibandingkan dengan temuan studi representasi perempuan dalam wacana media Islam terbaru. Analisis wacana kritis atas koran berideologi islam, misalnya memperlihatkan kecenderungan menampilkan perempuan sebagai pihak yang perlu diadvokasi sekaligus sebagai objek yang harus dilindungi, bukan sebagai subjek yang menentukan agenda. Logika yang sama dapat dilacak ke masa kemerdekaan, yaitu perempuan sering ditampilkan sebagai korban kolonialisme, kemiskinan, atau dekadensi moral, sementara solusi yang ditawarkan adalah penguatan peran domestik dalam bingkai keislaman, bukan perluasan akses terhadap kekuasaan politik.

Dari sudut teori gender, ambivalensi ini berkaitan erat dengan bagaimana patriarki bekerja melalui bahasa. Studi tentang ketimpangan gender di Indonesia

¹⁷ Arkanuddin Padang and Kamalia, 'INDEPENDENT WOMEN IN THE DIGITAL ARENA : NEGOTIATING IDENTITY AND POWER IN CONTEMPORARY ISLAMIC COMMUNICATION', *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 10, no. 2 (2025): 445–61.

¹⁸ Kevin W. Fogg, 'ISLAM IN INDONESIA ' S FOREIGN POLICY, 1945-1949', *Al-Jāmi 'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015): 303–35, <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.303-335>.

menegaskan bahwa norma sosial dan kultural sampai termasuk tafsir keagamaan hingga membentuk struktur kesempatan yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan¹⁹. Dalam konteks bahasa politik Islam, ambivalensi wacana gender memungkinkan dua hal terjadi sekaligus: (1) pengakuan terbatas atas peran perempuan sehingga wacana tampak inklusif, dan (2) reproduksi batas-batas tradisional yang menjaga dominasi laki-laki, sehingga perubahan struktural tetap minimal.

Dengan demikian, ambivalensi wacana gender dalam bahasa politik Islam pada masa kemerdekaan bukan sekedar kontradiksi teks, tetapi strategi diskursif yang efektif. Ia memungkinkan tokoh Islam merespon tuntutan zaman, misalnya meningkatkannya pendidikan perempuan, keterlibatan mereka dalam organisasi, dan kebutuhan mobilisasi massa sampai tanpa harus merombak secara radikal hierarki gender yang sudah mapan. Pengakuan dan pembatasan berjalan bersama, perempuan disapa dan dipuji, tetapi pada saat yang sama diarahkan kembali ke peran-peran yang kompatibel dengan tafsir patriarkal atas agama dan bangsa.

Bahasa Politik sebagai Instrumen Konstruksi Gender

Bahasa politik Islam pada masa awal kemerdekaan tidak hanya menerminkan realitas gender, tetapi juga aktif mengonstruksi dan mempertahankan tatanan gender tertentu. Dalam perspektif analisis wacana, pilihan diksi, metafora, dan cara penyebutan perempuan misalnya sebagai ibu bangsa, pendamping yang setia, atau penjaga rumah tangga Islami berfungsi membatasi apa yang dianggap wajar dan sah bagi perempuan dalam ruang publik. Bahasa politik menjadi alat normalisasi jadi ia menyisipkan pesan bahwa perempuan yang baik adalah mereka yang mendukung perjuangan nasional dan Islam, tetapi tahap “tahu tempat” dalam hierarki keluarga dan masyarakat²⁰.

Studi tentang representasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa hingga era sekarang, bahasa politik masih sarat dikotomi domestik atau publik yang merugikan perempuan. Dalam kampanye dan wacana partai-partai benuansa

¹⁹ Vos Anna, *Gender Inequality in Indonesia in a Historical Perspective*, 2024, 4–20.

²⁰ Edward Aspinall et al., ‘Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?’, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27, <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.

islam, perempuan sering dijual sebagai figur “religius, lembut, dan mengayomi keluarga”, sementara kualitas kepemimpinan, kemampuan teknokratis, dan kapasitas pengambilan keputusan sering ditempatkan nomor sekian. Pola ini merupakan kelanjutan dan konstruksi yang dibangun sejak masa kemerdekaan, ketika bahasa politik islam lebih menekankan fungsi perempuan sebagai simbol moral daripada aktor politik.

Bahasa politik juga berperan dalam menentukan siapa yang dianggap layak bicara tentang urusan publik. Dalam banyak teks keagamaan dan politik, otoritas berbicara tentang bangsa dan negara dilekatkan pada ulama laki-laki, pemimpin partai, atau aktivis laki-laki, sementara suara perempuan diposisikan sebagai pengalaman yang harus disalurkan melalui perantara laki-laki atau lembaga tertentu. Representasi perempuan sebagai objek pembelaan hingga melindungi kaum ibu dari penjajahan moral dan ekonomi hingga membuat mereka tampak penting, tetapi pada saat yang sama menutup kemungkinan mereka untuk tampil sebagai pembicara utama.

Di sisi lain, kajian tentang gerakan perempuan islam menunjukkan bahwa perempuan juga belajar menggunakan bahasa politik dan keagamaan untuk menegosiasikan ruang. Organisasi seperti “Aisyiyah, Muslimat, dan Fatayat, misalnya, memanfaatkan istilah-istilah seperti “amar ma’ruf nahi munkar”, pengabdian kepada umat, dan pendidikan akhlak generasi untuk memberikan keterlibatan mereka dalam pendidikan, kesehatan, hingga advokasi sosial²¹. Dengan menggunakan kosa kata yang diakui sah oleh otoritas laki-laki, mereka dapat memperluas peran tanpa secara frontal menantang struktur patriarki.

Dalam perspektif feminis kontemporer tentang gerakan politik Islam, bahasa politik dipahami sebagai arena tawar-menawar yang dinamis. Penelitian mutakhir mengenai perempuan dalam gerakan politik Islam menunjukkan bahwa perempuan mengembangkan berbagai strategi retorik hingga mulai dari mengutip teks keagamaan, memanfaatkan narasi keadilan sosial, hingga menggunakan media digital sampai

²¹ Dian Rizky Azhari et al., ‘Battle of Islamic Women’s Discourse through Popular Culture in Post-Authoritarian Indonesia’, *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series* 6, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.20961/ijsascs.v6i2.73913>.

untuk menegaskan agensi mereka di tengah batasan institusional dan ideologis²². Pemahaman ini membantu membaca kembali masa kemerdekaan: meski dokumen tertulis didominasi oleh tokoh laki-laki, kita dapat melihat bagaimana perempuan dan organisasi perempuan ikut membentuk wacana melalui tulisan, majalah, dan forum internal yang menafsirkan ulang peran perempuan dalam bingkai Islami.

Bahasa politik Islam juga mengukuhkan patriarki melalui apa yang tidak dikatakan. Misalnya, ketika pidato tokoh laki-laki menekankan pentingnya “peran ibu dalam rumah tangga Islami” tanpa pernah menyebut hak politik perempuan, hal itu secara implisit menandai bahwa ruang politik formal bukan domain mereka. Studi tentang ketimpangan gender dalam perspektif historis menunjukkan bahwa apa yang dihilangkan dari wacana publik sama pentingnya dengan apa yang diucapkan, karena keduanya membentuk horizon kemungkinan bagi tindakan sosial.²³ Hilangnya figur perempuan sebagai legislator, perunding, atau pemimpin pasca-kemerdekaan dari narasi resmi memperkuat kesan bahwa kepemimpinan adalah hak laki-laki.

Seiring waktu, pola konstruksi gender yang dibentuk oleh bahasa politik Islam di masa awal kemerdekaan beresonansi dalam kebijakan dan praktik politik kontemporer. Kajian tentang domestikasi perempuan dalam politik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kuota dan regulasi telah membuka pintu formal, wacana yang menekankan tugas utama perempuan di ranah domestik tetap menjadi hambatan kultural yang kuat.²⁴ Di sini terlihat mata rantai yang menghubungkan retorika masa kemerdekaan dari yang mengidealkan perempuan sebagai penjaga rumah tangga Islami hingga dengan kesulitan perempuan untuk diakui sebagai pemimpin politik penuh di era demokrasi.

Pada saat yang sama, perkembangan media dan ruang digital memberikan peluang baru untuk mengganggu konstruksi lama tersebut. Penelitian tentang perempuan Indonesia yang menegosiasikan identitas “perempuan mandiri” di ruang

²² Padang and Kamalia, ‘INDEPENDENT WOMEN IN THE DIGITAL ARENA : NEGOTIATING IDENTITY AND POWER IN CONTEMPORARY ISLAMIC COMMUNICATION’.

²³ Moh Alfin Rosyidi et al., ‘Bulletin of Indonesian Islamic Studies Discourse on Women ’ s Leadership in the Qur ’ an from the Perspective of’, *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4 (2025).

²⁴ Evi Novida Ginting Manik and Fredick Broven Ekayanta, ‘Women’s Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture’, *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 2024, 228–41, <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>.

digital berbasis nilai Islam menunjukkan bahwa perempuan kini mampu memproduksi bahasa politik mereka sendiri hingga menggabungkan narasi kesalehan, kemandirian ekonomi, dan hak berbicara di ruang publik. Dinamika ini menunjukkan bahwa bahasa politik Islam bukan struktur beku; ia selalu dapat direinterpretasi dan dinegosiasikan, termasuk oleh perempuan yang dahulu hanya diposisikan sebagai objek wacana.

Dengan demikian, membaca bahasa politik Islam sebagai instrumen konstruksi gender membantu menjelaskan mengapa kesenjangan antara pengakuan simbolik dan representasi substantif perempuan bertahan begitu lama. Melalui bahasa, nilai-nilai patriarkal dilembagakan, dinormalisasi, dan diwariskan lintas generasi. Namun, melalui bahasa pula dari baik dalam bentuk pidato, tulisan, maupun ekspresi digital, perempuan dapat membangun kontra-wacana yang menantang cara lama memaknai perempuan sebagai sekadar “pendukung” dan “penjaga moral”, dan mulai memposisikan diri sebagai warga negara dan subjek politik yang setara.

Implikasi Representasi Gender terhadap Ruang Publik Perempuan

Representasi gender dalam ruang publik menunjukkan dinamika yang kompleks dan tidak selalu linear antara kemajuan formal dan realitas substantif. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memasuki sektor-sektor publik seperti politik, birokrasi, pendidikan, dan sektor profesional lainnya, keberadaan mereka belum sepenuhnya diterima maupun diakui sebagai aktor sosial yang setara. Secara simbolik, akses perempuan terhadap ruang publik telah meningkat, namun konteks sosial dan kultural masih memproduksi stereotip yang mereduksi posisi perempuan. Sejumlah kajian mencatat bahwa perempuan dalam ruang publik kerap dipersepsikan sebagai “makhluk domestik,” emosional, atau kurang kredibel, sehingga status mereka tetap berada dalam bayang-bayang konstruksi patriarki yang mengakar kuat dalam budaya masyarakat²⁵. Persepsi demikian memperlihatkan bahwa representasi formal tidak otomatis menghapus bias sosial yang telah lama dilekatkan pada peran perempuan. Meskipun secara formal perempuan sudah berkiprah di berbagai sektor publik seperti politik, pemerintahan,

²⁵ Lilis Karwati et al., ‘Ketimpangan Representasi Stereotipe Perempuan Dalam Ruang Publik’, *Journal of Lifelong Learning* 7, no. 2 (2024).

pendidikan, hiburan, persepsi publik demikian menandakan bahwa struktur sosial dan norma masih sangat membatasi akses dan penerimaan perempuan secara sejajar di ruang publik²⁶.

Pengaruh konstruksi sosial atas ruang publik dan ruang privat semakin memperjelas bagaimana pengalaman perempuan dibatasi oleh struktur gender yang diwariskan secara kultural. Analisis konseptual mengenai ruang berbasis gender menunjukkan bahwa ruang privat secara tradisional dilekatkan pada peran domestik perempuan, sedangkan ruang publik dikaitkan dengan aktivitas politik, ekonomi, dan sosial yang dianggap sebagai ranah laki-laki²⁷. Pembagian ini berdampak langsung pada rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya publik seperti pendidikan, jaringan politik, dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, meskipun perempuan “diperbolehkan” masuk ke dalam ruang publik, norma-norma yang membentuk struktur sosial tetap mengarahkan perempuan kembali ke ruang domestik dan membatasi partisipasi mereka secara setara. Situasi ini menyebabkan perempuan menghadapi hambatan struktural yang tidak dialami oleh laki-laki, sehingga kesetaraan formal tidak berbanding lurus dengan kesetaraan substantif.

Tantangan tersebut juga tampak dalam konteks partisipasi politik. Peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif memang menjadi indikator penting kemajuan representasi, namun penelitian menunjukkan bahwa kenaikan angka keterwakilan tidak selalu menghasilkan pengaruh nyata dalam proses perumusan kebijakan. Perbedaan antara representasi deskriptif dan substantif terlihat sangat jelas: kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak secara otomatis menjamin adanya perubahan kebijakan yang responsif gender. Efek substantif tersebut sangat dipengaruhi oleh variabel lain, termasuk budaya partai, struktur institusi politik, sensitivitas gender dalam proses legislasi, dan ketersediaan dukungan politik maupun ekonomi bagi perempuan. Dengan kata lain, representasi perempuan belum tentu bermuara pada transformasi kebijakan apabila sistem politik masih dikuasai nilai dan praktik patriarki.

²⁶ Nur Ridwan, ‘Standar Ganda Perempuan dalam Ruang Publik’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 184–92, <https://doi.org/10.59000/jim.v2i2.133>.

²⁷ Jahanzeb Khan, ‘Gendered Spaces: Examining the Role of Public and Private Spheres in Women’s Empowerment’, *Journal of Gender, Power, and Social Transformation* 2, no. 1 (2025).

Dalam konteks Indonesia, pola yang sama juga terlihat. Berbagai penelitian mengenai dinamika politik lokal memperlihatkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi marginal dalam proses pengambilan keputusan, bahkan ketika telah memperoleh kursi legislatif melalui kebijakan afirmatif. Hambatan struktural seperti budaya politik maskulin, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan politik, serta stereotip gender menyebabkan perempuan sering tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan agenda politik. Meskipun secara formal terdapat regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan, praktik politik masih menunjukkan minimnya ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan suara dan gagasan mereka secara substantif²⁸. Keadaan ini menghasilkan fenomena tokenisme, yaitu situasi di mana perempuan hadir dalam struktur politik tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan.

Media massa turut memperkuat konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik dan ruang publik. Analisis linguistik dan wacana terhadap pemberitaan politik menunjukkan bahwa politisi perempuan lebih sering diekspos melalui isu-isu non-substantif seperti penampilan, gaya hidup, atau karakter personal, dibandingkan visi politik, kapasitas kepemimpinan, dan kompetensi mereka. Penelitian juga menemukan pola sentimen negatif yang lebih sering dialamatkan kepada politisi perempuan ketika aspek personal mereka diberitakan, sedangkan politisi laki-laki cenderung diperlakukan lebih netral dan profesional. Pemberitaan semacam ini mereproduksi bias gender dan mengukuhkan pandangan bahwa perempuan bukan aktor politik utama, melainkan figur sekunder yang harus “dilihat” sebelum “didengar”²⁹. Di Indonesia, kajian wacana kritis terhadap berita politik daring juga menunjukkan bahwa perempuan kerap ditempatkan sebagai objek wacana alih-alih subjek politik yang berdaulat. Dengan demikian, representasi gender di ruang publik dan politik bukan hanya soal “kehadiran” atau kuantitas perempuan, melainkan bagaimana wacana, norma sosial, dan struktur institusional merespon kehadiran itu.

²⁸ Rindi Astika Yuliana and Istiana Hermawati, *Evolusi Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal Indonesia: Tantangan Dan Peluang*, 5, no. 2 (2025).

²⁹ Emanuele Brugnoli et al., ‘Gender Stereotypes in the Mediated Personalization of Politics: Empirical Evidence from a Lexical, Syntactic and Sentiment Analysis’, arXiv:2202.03083, preprint, arXiv, 13 April 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03083>.

Fenomena standar ganda turut menjadi bagian penting dari pembahasan representasi gender ini. Masyarakat cenderung menerapkan kriteria moral dan sosial yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam konteks yang sama. Perempuan yang aktif di ruang publik sering kali dianggap melanggar norma keteraturan gender, sehingga menerima penilaian moral lebih ketat dibandingkan laki-laki. Beban moral ini berdampak pada bagaimana aktivitas perempuan dipersepsikan oleh publik dan memengaruhi legitimasi sosial mereka dalam ruang sosial maupun politik³⁰. Standar ganda ini beroperasi baik secara eksplisit maupun tersirat, sehingga sering kali tidak mudah diidentifikasi tetapi sangat kuat membentuk batasan partisipasi perempuan.

Transformasi ruang publik menjadi lebih luas melalui perkembangan teknologi digital juga belum sepenuhnya memberi ruang bebas bagi perempuan. Meskipun internet menyediakan akses yang lebih cepat dan luas terhadap diskursus politik dan sosial, penelitian menunjukkan bahwa ruang digital tetap mencerminkan hierarki gender yang ada di dunia nyata. Norma heteronormatif, bias gender, serta praktik intimidasi atau pelecehan di dunia maya membuat banyak perempuan enggan mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka dalam ruang virtual. Akibatnya, perluasan ruang publik melalui teknologi tidak otomatis menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk tampil sebagai aktor sosial yang setara. Ruang virtual justru dapat menjadi arena baru bagi reproduksi stereotip dan bias gender apabila tidak dikelola secara inklusif.

Dari semua dinamika tersebut, kita dapat melihat bahwa implikasi representasi gender terhadap ruang publik perempuan bersifat kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, ada kemajuan nyata yaitu perempuan memperoleh akses, muncul kebijakan afirmatif, dan ada dukungan normatif di tingkat regulasi dan institusi untuk keterwakilan. Di sisi lain, restrukturisasi budaya, wacana, dan norma sosial berjalan jauh lebih perlahan sehingga banyak ruang sosial tetap didominasi maskulinitas, dan perempuan tetap dipinggirkan dalam hal legitimasi, otoritas, dan kekuasaan nyata. Akibatnya, peluang emansipasi melalui representasi politik formal sering terbatas — cenderung simbolis daripada transformasional. Perempuan mungkin menjadi “wajah”

³⁰ Nur Ridwan, ‘Standar Ganda Perempuan dalam Ruang Publik’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 184–92, <https://doi.org/10.59000/jim.v2i2.133>.

di parlemen, dewan, atau organisasi tetapi tanpa akses terhadap sumber daya, jaringan, kekuasaan struktural, dan dukungan wacana, keberadaan itu bisa saja kosong makna: kehadiran tanpa kekuasaan, representasi tanpa perubahan.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa perubahan tidak mustahil dan bahwa perempuan serta aktor pro-gender telah mengembangkan strategi resistensi, adaptasi, dan afirmasi. Peningkatan pendidikan perempuan, mobilitas sosial, kesadaran akan hak-hak, serta munculnya media alternatif dan gerakan perempuan pro-reformasi telah menjadi katalis. Misalnya, dalam ruang publik fisik dan perencanaan kota, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika perencanaan, desain, dan manajemen ruang publik mempertimbangkan perspektif gender, ruang publik bisa menjadi lebih inklusif dan ramah bagi perempuan sehingga mendorong partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik³¹.

Dalam konteks kebijakan dan transformasi sosial, hasil-hasil literatur ini membawa sejumlah implikasi penting. Pertama, perlu pendekatan multidimensional dalam pemberdayaan perempuan, tidak hanya melalui kuota atau representasi formal, tetapi juga melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, akses sumber daya, jaringan, dukungan sosial, dan advokasi wacana agar perempuan bisa benar-benar berdaya, bertindak, dan mempengaruhi kebijakan.

Kedua, ruang publik, baik fisik maupun virtual harus direstrukturisasi agar inklusif gender. Ini berarti perencanaan kota atau ruang publik dengan sensitif gender, manajemen ruang publik yang mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan perempuan, serta ruang daring di mana perempuan bisa berbicara bebas tanpa terintimidasi oleh stereotip atau misogini. Ketiga, media dan wacana publik perlu memainkan peran konstruktif dengan memproduksi representasi perempuan sebagai subjek yang sah, berkompeten, dan punya kapabilitas, bukan sekadar objek representasi sehingga publik dan norma sosial bisa berubah secara bertahap.

Akhirnya, jalan menuju emansipasi dan kesetaraan gender yang sejati harus dipahami sebagai proses panjang dan multidimensi bukan hanya soal kuantitas atau

³¹ Ariane Pereira and Emília Malcata Rebelo, 'Women in Public Spaces: Perceptions and Initiatives to Promote Gender Equality', *Cities* 154 (November 2024): 105346, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105346>.

representasi formal, melainkan transformasi budaya, struktur sosial, wacana, dan institusi. Perempuan bukan hanya butuh kursi di parlemen, tetapi kekuasaan, pengaruh, dan legitimasi untuk membawa perubahan. Hanya dengan demikian, representasi gender di ruang publik bisa mewujudkan emansipasi substantif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa representasi perempuan dalam retorika politik Islam pada masa kemerdekaan membentuk pola wacana yang ambivalen: perempuan diberi ruang pengakuan sebagai bagian dari perjuangan bangsa, namun tetap diposisikan dalam kerangka domestik yang membatasi peran publik mereka. Bahasa politik yang berkembang pada periode tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi sosial patriarkal, tetapi turut mengonstruksi batas-batas peran perempuan dalam ruang publik, sehingga kehadiran mereka lebih bersifat simbolis daripada substantif. Temuan ini membuktikan bahwa wacana politik masa kemerdekaan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan norma sosial dan partisipasi politik perempuan di era berikutnya, termasuk munculnya standar ganda, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, serta reproduksi stereotip melalui media dan praktik sosial.

Meskipun kini perempuan memiliki akses lebih luas ke ruang publik, warisan historis tersebut menunjukkan bahwa transformasi struktural belum sejalan dengan perubahan kultural. Partisipasi politik dan sosial perempuan masih sering terhambat oleh bias institusional, representasi media yang tidak setara, serta konstruksi ruang yang tidak sensitif gender. Dengan demikian, upaya emansipasi perempuan tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan representasi formal, tetapi memerlukan perubahan paradigma wacana dan norma sosial yang lebih mendasar.

Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan, organisasi Islam, dan institusi publik untuk mengembangkan literasi wacana yang lebih kritis dan mengarusutamakan perspektif kesetaraan gender dalam setiap produksi pengetahuan dan kebijakan. Penelitian selanjutnya perlu memperkaya sumber primer dari perspektif perempuan agar gambaran historis mengenai agensi perempuan lebih komprehensif.

Selain itu, ruang publik baik fisik maupun digital perlu dikelola secara lebih

inklusif melalui desain, regulasi, dan praktik sosial yang memberi legitimasi, keamanan, serta kesempatan nyata bagi perempuan untuk berpartisipasi dan berpengaruh. Dengan langkah-langkah tersebut, representasi perempuan di ruang publik dapat bergerak dari sekadar simbol menuju partisipasi substantif yang mampu mengubah struktur sosial secara lebih berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adli, Syahrul. *Mosi Integral: Gagasan M. Natsir Dalam Mempersatukan Indonesia Tahun 1950*. 2023.
- Adzkia, Hanina Najma, and Farhan Fahreza. *Pemikiran Pendidikan Rahmah El Yunusiyah: Nilai Keislaman Dan Emansipasi Perempuan Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam Kontemporer*. 2025.
- Aisyah, Rania Dhiyaulhaq. *Transformasi Gerwani: Keterlibatan dalam Perjuangan Gender Hingga Stigmatisasi Pasca 1965*. 8, no. 2 (2025).
- Anisa, Khoirul. *Peran Sosial Perempuan Pada Zaman Rasulullah Hingga Zaman Modern*. 5, no. 3 (2025).
- Anna, Vos. *Gender Inequality in Indonesia in a Historical Perspective*. 2024, 4–20.
- Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. ‘Women’s Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?’ *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Azhari, Dian Rizky, M. Yoesoef, and Turita Indah Setyani. ‘Battle of Islamic Women’s Discourse through Popular Culture in Post-Authoritarian Indonesia’. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series* 6, no. 2 (2022): 19. <https://doi.org/10.20961/ijcsacs.v6i2.73913>.
- Badara, Aris, and Jamiludin. ‘Representation of Indonesian Women Workers: A Critical Discourse Analysis on the Newspapers of Nationalist-Secular and Islamic Ideological Perspectives’. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 1 (2020): 79–101. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.79-101>.



- Barton, Greg, Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morieson. 'Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia'. *Religions* 12, no. 8 (2021): 641. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.
- Brugnoli, Emanuele, Rosaria Simone, and Marco Delmastro. 'Gender Stereotypes in the Mediated Personalization of Politics: Empirical Evidence from a Lexical, Syntactic and Sentiment Analysis'. arXiv:2202.03083. Preprint, arXiv, 13 April 2022. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03083>.
- Dwi Aria Yuliantri, Rhoma, Aman Aman, and Awanis Akalili. 'Gender Discourse in Islamic Online Media, 2000-2021'. *Informasi* 53, no. 2 (2023): 349–56.
- Fogg, Kevin W. 'ISLAM IN INDONESIA ' S FOREIGN POLICY, 1945-1949'. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 2 (2015): 303–35. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.303-335>.
- Hamidah, Hamidah. 'Indonesian Islamic Movement of Women: A Study of Fatayat Muslimat Nu (1938-2013)'. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 162–74. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.260>.
- Karwati, Lilis, Nastati Novitasari, and Hamidah Hamidah. 'Ketimpangan Reprerentasi Stereotipe Perempuan Dalam Ruang Publik'. *Journal of Lifetong Learning* 7, no. 2 (2024).
- Khan, Jahanzeb. 'Gendered Spaces: Examining the Role of Public and Private Spheres in Women's Empowerment'. *Journal of Gender, Power, and Social Transformation* 2, no. 1 (2025).
- Manik, Evi Novida Ginting, and Fredick Broven Ekayanta. 'Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture'. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 2024, 228–41. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>.
- Nasri, Ulyan, and Nasirin Nasirin. *Tafsir Gender Dan Peran Pendidikan Islam Bagi Perempuan Di Zaman Kolonial*. 3, no. 2 (2025).
- Nazwa, Shopiyyah, and Nuriza Dora. *Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan*. 9 (2024).
- Padang, Arkanuddin, and Kamalia. 'INDEPENDENT WOMEN IN THE DIGITAL ARENA: NEGOTIATING IDENTITY AND POWER IN



- CONTEMPORARY ISLAMIC COMMUNICATION’. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)* 10, no. 2 (2025): 445–61.
- Pereira, Ariane, and Emília Malcata Rebelo. ‘Women in Public Spaces: Perceptions and Initiatives to Promote Gender Equality’. *Cities* 154 (November 2024): 105346. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105346>.
- Pohan, Muslim. ‘Politik Seksual Terhadap Organisasi Perempuan Pasca Kemerdekaan Di Indonesia’. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 1 (2020): 22–30. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1554>.
- Ridwan, Nur. ‘Standar Ganda Perempuan dalam Ruang Publik’. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2023): 184–92. <https://doi.org/10.59000/jim.v2i2.133>.
- Rosyidi, Moh Alfin, Khobirul Amru, and Wildah Nurul Islami. ‘Bulletin of Indonesian Islamic Studies Discourse on Women ’ s Leadership in the Qur ’ an from the Perspective of’. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 4 (2025).
- Suhada, Djilzaran Nurul, Rahmi Hidayati, and Susvia Delta Kusdiane. *Wacana dan Kuasa Retorika Linguistik-Politik Agama dalam Gerakan Sosial Indonesia*. 2024.
- Wardani, Mufti. ‘Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Islam: Analisis Historis, Teologis, dan Sosio-Politik’. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1286–97. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.644>.
- Wibowo, Wahyu, Alda Fildza Amima, Mega Rahmawati, Ahmad Wildan Raikhana, and Arum S. Lessy. ‘Perempuan dan Literasi Finansial dalam Rumah Tangga: Sintesis Literatur Gender dan Ekonomi’. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2026).
- Wirahman, Hardiman, and Nur Alfiyani. ‘Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia’. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 114–31. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.463>.
- Yuliana, Rindi Astika, and Istiana Hermawati. *Evolusi Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal Indonesia: Tantangan Dan Peluang*. 5, no. 2 (2025).



Zulfadli, Jamhari Makruf, Zulkifli, and Jajang Jahroni. 'From Islamic Modernism to Islamic Conservatism: The Case of West Sumatra Provinces, Indonesia'. *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2406297.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2406297>.